

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekolah merupakan organisasi sektor publik yang bergerak di bidang pendidikan yang memiliki peran penting di dalam mendidik generasi penerus bangsa. Tujuan pendidikan ialah perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi pada subyek didik setelah mengalami proses pendidikan (Maunah, 2009).

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Proses pendidikan yang baik tentunya akan melahirkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing serta kemampuan yang mumpuni.

Pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu: (1) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, (2) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, (3) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Sekolah merupakan entitas sektor publik yang tentunya membutuhkan anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan kegiatannya. Peningkatan kualitas pendidikan harus didukung dengan adanya dana, sumber daya manusia, dan material (Hapenciuc, 2007). Mengelola keuangan suatu entitas khususnya entitas yang bergerak di sektor publik secara efektif dan tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja entitas sektor publik tersebut. Pengelolaan keuangan pada umumnya dilakukan oleh entitas dengan tujuan untuk mengetahui alur dana yang dikelola. Ketersediaan dana yang lebih dari cukup jika tidak dikelola dengan baik, maka akan timbul permasalahan seperti: (1) penyimpangan dana, (2) ketidaksesuaian antara belanja dengan perencanaan belanja. Penyajian laporan keuangan pada lembaga pendidikan, fungsinya adalah untuk pengelolaan pembiayaan lembaga pendidikan agar kegiatan operasional dan aktivitas belajar-mengajar tetap berjalan dengan baik dan lancar (Yuesti, 2020).

Pengelolaan keuangan yang dilakukan sekolah umumnya sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Besaran anggaran atau dana yang diterima sekolah tergantung pada jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah, tingkat pembangunan di sekolah, serta biaya operasional yang dibutuhkan. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik serta sesuai dengan arahan pemerintah akan menunjukkan keberhasilan sekolah dalam mengelola anggaran pendidikan yang telah diberikan. Dalam mengelola keuangan sekolah banyak faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah faktor *intern* dan *ekstern*. Faktor *intern* dalam pengelolaan keuangan sekolah berkaitan dengan individu yang mengelola keuangan itu sendiri, seperti: (1) tingkat pendidikan, (2) pengalaman kerja. Faktor *ekstern* dalam pengelolaan keuangan

sekolah berkaitan dengan pemerintah, seperti: (1) peraturan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah, (2) kondisi serta situasi.

Pengelolaan keuangan tidak terlepas dari transparansi dan akuntabilitas agar nantinya dana yang dikelola dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah serta sesuai dengan tuntutan *stakeholders* yang ada. Alokasi anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya mengalami peningkatan, peningkatan anggaran yang diberikan membuka peluang korupsi karena rendahnya kemampuan serta kesadaran dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang diberikan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan non-personalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non-spesifik. Tahun anggaran 2020 banyak terjadi perubahan dalam teknis pelaksanaan dana BOS ini, salah satunya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 pasal 9 menjelaskan bahwa sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah dana BOS Reguler masuk ke rekening sekolah.

Perubahan teknis dalam penyelenggaraan dana BOS ini terjadi karena pandemi *covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 hingga saat ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dana BOS kepada kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang sebelumnya melibatkan pihak provinsi dalam penyaluran dana melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dengan

adanya prosedur dana BOS yang masuk ke rekening sekolah dan kepala sekolah mempunyai wewenang sepenuhnya dalam mengelola dana BOS tentu nya tidak menjamin bahwa pengelolaan dana BOS ini akan maksimal. Di Kabupaten Gianyar pada tahun 2018 laporan fiktif BOS pada Sekolah Menengah Kejuruan pernah terjadi, laporan fiktif ini terjadi karena tim pengelola BOS tidak pernah mengumumkan dipapan pengumuman dana bos diterima beserta pertanggungjawabannya. Dalam kasus ini besaran penyelewengan dana BOS mencapai Rp1,5 Miliar dalam rentang waktu 3 tahun, pada tahun 2016-2018.

Dalam perencanaan dana bos sekolah harus memperhatikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam penyusunan RKAS perlu memperhatikan asas anggaran, yaitu asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan (Ariyani, 2019). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini memiliki tiga kategori yaitu: (1) Dana BOS Reguler, (2) Dana BOS Afirmasi, (3) Dana BOS Kinerja. Dana BOS prioritas yang diberikan pemerintah kepada sekolah adalah Dana BOS Reguler, serta terdapat 3 tahapan dalam pencairan dana pada setiap tahun anggaran.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kabupaten Gianyar khususnya pada jenjang SMA dan SMK terdapat 39 sekolah baik negeri maupun swasta yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Terdiri dari 15 SMA/SMK Negeri dan 25 SMA/SMK Swasta. Data dana BOS SMA/SMK Negeri/Swasta Kabupaten Gianyar pada tahun anggaran 2020:

Tabel 1.1
Dana BOS SMA/SMK Kabupaten Gianyar TA 2020

SMA/SMK Negeri	SMA/SMK Swasta
----------------	----------------

SMA Negeri Rp10.130.100.000,00	SMA Swasta Rp1.474.350.000,00
SMK Negeri Rp11.651.200.000,00	SMK Swasta Rp15.203.520.000,00

(Sumber: <https://bos.kemdikbud.go.id>)

Good governance atau tata kelola yang baik merupakan pedoman pengelolaan suatu organisasi yang berorientasi terhadap para *stakeholders*, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja (Wahyudin, 2009). Konsep tata kelola yang baik yang dijelaskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) yang menekankan pada pengelolaan perusahaan berdasarkan lima dasar yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*.

Transparansi dalam penerimaan dan pengeluaran dana serta keterbukaan informasi ke publik mencerminkan sekolah sebagai entitas sektor publik memiliki kejelasan pelaporan dana yang dapat dilihat oleh masyarakat. Terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan keuangan sekolah pada umumnya transparansi pengelolaan keuangan sekolah, seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PAD. Tentunya setiap penggunaan dana yang dilakukan sekolah haruslah melalui musyawarah dengan orang tua siswa. Keadaan di lapangan menunjukkan sebagian besar orang tua tidak mengetahui informasi keuangan sekolah terutama dana yang dimiliki sekolah saat ini. Sehingga sangat rentan akan terjadinya ketidaksesuaian pengalokasian dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Akuntabilitas publik diharuskan penekanannya pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (Tandililing, 2019). Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kinerja, proses, manajemen akan tetapi berkaitan pula dengan pelaporan keuangan sekolah serta kualitas *output*. Akuntabilitas keuangan sekolah diukur dengan semakin kecilnya penyimpangan (ketidaksesuaian) dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Pengalaman kerja dapat mempengaruhi individu dalam melaksanakan tugas yang diberikan, umumnya semakin lama seseorang bekerja dibidangnya maka akan bertambah pula keahlian dibidangnya. Jika seseorang semakin lama melaksanakan tugas dalam bidang keuangan maka akan semakin memahami tentang permasalahan keuangan. Pengalaman kerja adalah proses dimana keterampilan serta pengetahuan dibentuk dan dikembangkan dalam suatu pekerjaan karena tuntutan pelaksanaan tugas pekerjaan.

Menurut Sutrisna (2018) pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan secara baik dan benar menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan sekolah benar-benar menjalankan amanat sesuai dengan aturan yang berlaku. Manajemen keuangan sekolah berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan karakteristik individu seperti: tingkat pendidikan, latar. Faktor eksternal terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah seperti: kebijakan-kebijakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutrisna (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan,

pengendalian *intern* akuntansi, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah.

Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Fadli (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pengelolaan dana BOS telah sesuai dengan prinsip seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59, serta faktor pendukung pengelolaan keuangan BOS di sekolah SMA Negeri 1 Bandar yaitu dewan guru dan kepala sekolah di sekolah SMA Negeri 1 Bandar terhadap realisasi pengelolaan dana BOS di sekolah SMA Negeri 1 Bandar tahun pelajaran 2017-2018. Sedangkan faktor penghambat masih kurangnya dana BOS yang diberikan.

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel berbeda dan beberapa variabel mengambil beberapa variabel dalam penelitian sebelumnya. Variabel-variabel tersebut adalah tingkat pendidikan pengelola keuangan, transparansi, akuntabilitas. Perbedaan lainnya dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian yang digunakan. Penelitian ini memilih tempat penelitian yang berlokasi di Kabupaten Gianyar tepatnya pada SMA/SMK Negeri di Kabupaten Gianyar. Beberapa hal ini yang menjadi faktor pembeda dengan penelitian sebelumnya.

Proses pelaporan penggunaan dana tentunya harus dilaporkan tepat waktu, di Kabupaten Gianyar sendiri dana BOS yang dikelola sekolah khususnya SMA/SMK negeri masih terdapat kendala dalam pelaporan penggunaan dana. Tahun anggaran 2020 pelaporan penggunaan dana BOS tahap 3 di kabupaten Gianyar terdapat

beberapa sekolah SMA/SMK yang belum melaporkan penggunaan dana BOS selama periode tahap 3. Dikarenakan terdapat kendala *intern* seperti kurangnya pemahaman serta situasi pandemi yang memaksa beberapa sekolah merombak penyaluran dana yang didapatkan dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, peneliti mengambil judul: **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan, Pengalaman Kerja, Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan yang peneliti ajukan antara lain:

1. Perubahan teknis dalam penyelenggaraan dana BOS ini terjadi karena pandemi *covid-19*. Tahun anggaran 2020, pengelolaan dana BOS diberikan kepada kepala sekolah melalui rekening sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan sekolah yang sebelumnya melibatkan pihak provinsi dalam penyaluran dana melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Pengelolaan keuangan sekolah tentunya harus sesuai dengan Kebijakan *Governance* yang menekankan pada pengelolaan perusahaan berdasarkan 5 dasar yaitu: *Transparancy*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness*. Dengan adanya prosedur dana BOS yang masuk ke rekening sekolah dan kepala sekolah

mempunyai wewenang sepenuhnya dalam mengelola dana BOS tentu nya tidak menjamin bahwa pengelolaan dana BOS ini akan maksimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan sekolah pada SMA/SMK Negeri di Kabupaten Gianyar. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan pengelola keuangan sekolah, pengalaman kerja, prinsip akuntabilitas, dan transparansi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah yang nantinya menjadi pokok bahasan dalam penelitiann, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan pengelola keuangan sekolah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA/SMK Negeri di Kabupaten Gianyar.
2. Bagaimanakah pengaruh pengalaman kerja terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA/SMK Negeri di Kabupaten Gianyar.
3. Bagaimanakah pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA/SMK Negeri di Kabupaten Gianyar.

4. Bagaimanakah pengaruh prinsip transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA/SMK Negeri di Kabupaten Gianyar.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang peneliti buat yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pengelola keuangan sekolah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA/SMK Negeri di Kabupaten Gianyar.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA/SMK Negeri di Kabupaten Gianyar.
3. Untuk mengetahui pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA/SMK Negeri di Kabupaten Gianyar.
4. Untuk mengetahui pengaruh prinsip transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA/SMK Negeri di Kabupaten Gianyar.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat khususnya orang tua/wali siswa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberi informasi serta wawasan bagi orang tua/wali siswa seputar pengelolaan keuangan sekolah.
2. Bagi sekolah sebagai entitas sektor publik hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan, acuan dalam mengatasi masalah-masalah dalam peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan sekolah.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memantau pengelolaan keuangan sekolah karena bagaimana pun pemerintah sebagai pihak sentral dalam pengadaan anggaran, agar pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

1.6.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan sumber bacaan akuntansi mengenai pengaruh tingkat pendidikan pengelola keuangan, pengalaman kerja, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah.

